



## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2024

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) merupakan informasi utama keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada publik. Kewajiban Kepala Daerah menyampaikan RLPPD bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/ atau media elektronik.

Dasar penyusunan RLPPD antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hal tersebut maka Kami sampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 sebagai berikut:

### I. CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024 diukur berdasarkan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Tulang Bawang. Tergambar dari beberapa Indikator Kinerja Makro sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun N-1	Capaian Kinerja Tahun N	Laju Kinerja (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,56	72,24	0,85
2	Angka Kemiskinan	8,04	7,88	- 1,99
3	Angka Pengangguran	3,46	3,23	-6,647
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,27	4,75	10,981
5	Pendapatan Per Kapita	1.027.828	1.118.536	8,825
6	Ketimpangan Pendapatan ( <i>Gini Rasio</i> )	0.284	0.271	- 4,577

Sumber : BPS Kabupaten Tulang Bawang.

#### 1. Indeks Pembangunan Manusia

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian IPM Kabupaten Tulang Bawang tahun 2024 terus meningkat. Peningkatan tersebut terus terjadi seiring dengan peningkatan IPM Provinsi Lampung Tahun 2024, IPM Kabupaten Tulang Bawang mencapai angka 72,24 meningkat dari 71,56 di tahun 2023, namun angka tersebut masih berada dibawah IPM Provinsi Lampung. Sehingga perlu akselerasi pembangunan khususnya komponen yang terkait dengan pencapaian IPM Kabupaten Tulang Bawang. Peningkatan IPM ini seiring dengan komponen pembentuknya yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata lama sekolah (RLS), Angka Harapan Hidup dan Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

2023-2024 2020-2022 Cari data statistik

Freeze judul kolom

IPM - indikator	Indeks Pembangunan Manusia IPM (UHH SP2020)	
	2023	2024
Indeks Pembangunan Manusia	71,56	72,24
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,81	74,02
Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,29	12,30
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,57	7,65
Pengeluaran per Kapita disesuaikan (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	11.552,00	12.122,00

Keterangan Data :  
Sumber : Badan Pusat Statistik

## 2. Angka Kemiskinan

Pada periode 2018-2024 terlihat adanya tren penurunan persentase penduduk miskin. Kemudian pada tahun 2024 kemiskinan kembali menurun baik dari sisi jumlah absolute penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin. Pada tahun 2023 kemiskinan di Kabupaten Tulang Bawang mencapai 9,67 ribu jiwa atau sebesar 10,03 persen dari total penduduk Kabupaten Tulang Bawang. Sementara itu, persentase penduduk miskin Kabupaten Tulang Bawang di tahun 2024 turun menjadi 8,04 ribu jiwa atau sekitar 0,02 persen.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Terdapat dimensi lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Secara umum, pada periode tahun 2017-2023 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) cenderung berfluktuasi dari 10,09 pada tahun 2017 menjadi 7,88 pada tahun 2023. Diharapkan dengan nilai IP yang semakin kecil, penduduk miskin yang mendekati garis kemiskinan dapat terangkat dari kondisi miskin. Demikian pula dengan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan distribusi pengeluaran diantara penduduk miskin semakin rendah.

miskin-indikator	Indikator Kemiskinan Kabupaten Tulang Bawang		
	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan)	486.739,00	522.396,00	560.324,00
Persentase Penduduk Miskin (Persen)	8,42	8,04	7,88
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)	39,19	37,83	37,46
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,17	1,09	0,82
Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2)	0,26	0,23	0,17
Kemiskinan Ekstrem	1,16	-	-

Keterangan Data :

**Kemiskinan ekstrem** mengacu pada definisi Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu sebesar 1,9 US dollar PPP ( *purchasing power parity* ) per hari. Artinya penduduk yang penghasilan sehari tidak mencapai 1,9 US dollar PPP termasuk ke dalam kategori miskin ekstrem.

**Data Kemiskinan ekstrem 2023 belum tersedia**Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret.

### 3. Angka Pengangguran

Sesuai dengan data dari BPS, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Tulang Bawang mengalami penurunan dari 3,46 ditahun 2023 menjadi 3.23 persen ditahun 2024. Hal ini di karenakan meningkatnya jumlah angka kerja. Kemudian jumlah pekerja anak sudah mulai berkurang dari tahun ke tahun.

TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Tulang Bawang (Persen)	
	2023	2024
Tingkat Pengangguran Terbuka	3,46	3,23

Keterangan Data :

Data 2016 tidak tersedia (estimasi hanya sampai wilayah provinsi) Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), BPS

Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan penyerapan masing-masing sektor dari seluruh penduduk yang bekerja di pasar kerja Indonesia. Berdasarkan hasil olah data Sakernas, tiga lapangan pekerjaan yang memiliki distribusi tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Tulang Bawang adalah Pertanian, Manufaktur, dan Jasa. Pada tahun 2024, kontribusi kategori Pertanian terhadap penduduk bekerja menurut lapangan usaha merupakan yang tertinggi yaitu sebesar 61.884 orang, disusul kategori Jasa sebesar 28.912 orang, dan kategori Manufaktur sebesar 10.077 orang.

Jumlah penduduk yang bekerja pada kategori Pertanian dan Jasa memiliki kecenderungan yang sama yaitu meningkat dari tahun 2018 sampai tahun 2020 dan menurun di tahun 2024. Sedangkan pada kategori Manufaktur pada 2020 merupakan tahun dengan kontribusi terendah sebesar 9.987 orang, tetapi pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 10.007 orang. Tahun 2020 menjadi tahun dengan kontribusi jumlah penduduk yang bekerja menurut Lapangan Usaha tertinggi di kategori Pertanian dan Jasa sebesar 62.063 orang dan 29.617 orang.

### 4. Pertumbuhan Ekonomi

#### Pertumbuhan Ekonomi/PDRB Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Mencermati data target dan realisasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu tiga tahun terakhir, secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang terus meningkat begitupula dengan pencapaian target juga semakin membaik. Selama dua tahun terakhir ekonomi sangat optimis, namun karena adanya perlambatan ekonomi nasional dan provinsi berdampak pula dengan kinerja perekonomian Kabupaten Tulang Bawang yang juga ikut melambat. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi dinilai baik, karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tulang Bawang terakselerasi dan konsisten diatas angka delapan persen.

Lapangan Usaha	[Seri 2010] Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha (Persen)	
	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,82	0,16
B. Pertambangan dan Penggalian	3,45	2,24
C. Industri Pengolahan	1,77	6,62
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,38	0,53
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	-0,15
F. Konstruksi	5,76	8,39
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,46	8,04
H. Transportasi dan Pergudangan	17,10	9,19
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,13	4,59
J. Informasi dan Komunikasi	7,91	9,79
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,32	5,17
L. Real Estate	0,08	4,04
M,N. Jasa Perusahaan	2,26	8,55
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,96	5,73
P. Jasa Pendidikan	2,68	1,21
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,67	10,39
R,S,T,U. Jasa lainnya	12,96	9,54
<b>PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>4,28</b>	<b>4,75</b>

**PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN TULANG BAWANG  
TAHUN 2024 : 4,75 %**

**5. Pendapatan Perkapita**

PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2023 1.028.373/bulan terus meningkat menjadi 1.037.839/bulan di tahun 2024 sebesar 8,82 persen.

Kelompok Pengeluaran Konsumsi	Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Per-bulan untuk Makanan dan Bukan Makanan (Rupiah)		
	2021	2022	2023
Makanan	464.238	548.783	545.754
Non Makanan	391.114	469.578	482.074
<b>Total</b>	<b>855.352</b>	<b>1.018.362</b>	<b>1.027.828</b>

Catatan: PDRB Per Kapita Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 belum dirilis secara resmi oleh kantor BPS Tulang Bawang

**6. Ketimpangan Pendapatan**

Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) di Kabupaten Tulang Bawang pada tahun 2024 sebesar 0.271%, Capaian ini dikategorikan baik. Semakin kecil angka tersebut menunjukkan bahwa distribusi pendapatan penduduk di Kabupaten Tulang Bawang semakin merata. Nilai Ratio Gini Kabupaten Tulang Bawang selama kurun waktu 2017-2024 memiliki nilai yang relative lebih rendah. Gambaran tersebut sekaligus menjelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang relative lebih merata.

Wilayah	Rasio Gini
	2023
Tulang Bawang	0,284
Provinsi Lampung	0,324
Indonesia	0,388

Keterangan Data :

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Maret

Catatan: Gini Ratio Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 belum diriris secara resmi oleh kantor BPS Tulang Bawang

## II. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Pelayanan dasar yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang meliputi 6 (enam) urusan yaitu :

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Sosial.

Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang tercantum dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (LPPD) Tahun 2024 Kabupaten Tulang Bawang, berikut capaian kinerja 6 (enam) urusan pelayanan dasar Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024:

URUSAN PEMERINTAHAN	NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL	CAPAIAN KINERJA		
			RUMUS/PERSAMAAN	ELEMEN DATA	CAPAIAN KINERJA
PENDIDIKAN	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	10.781	71,46 %
			Jumlah anak usia 5-6 tahun pada provinsi bersangkutan	15.086	

	2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sedang belajar di sekolah dasar	<b>43.570</b>	<b>88,29 %</b>
			Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi bersangkutan	<b>49.350</b>	
	3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sedang belajar di sekolah menengah pertama	<b>18.038</b>	<b>70,59 %</b>
			Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan	<b>25.552</b>	
	4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat/ sedang belajar di pendidikan kesetaraan	<b>1.415</b>	<b>1,442 %</b>
			Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan	<b>98.088</b>	
<b>KESEHATAN</b>	5	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten/kota	<b>449</b>	<b>1,02 %</b>
			Jumlah penduduk di kabupaten/kota	<b>440.040</b>	

6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS rujukan yang terakreditasi	<b>4</b>	<b>100 %</b>
		Jumlah RS di kabupaten/kota	<b>4</b>	
7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	<b>7.744</b>	<b>95,46 %</b>
		Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota	<b>8.112</b>	
8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	<b>7.701</b>	<b>94,93 %</b>
		Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota	<b>8.112</b>	
9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>7.642</b>	<b>98,80 %</b>
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota	<b>7.735</b>	
10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>29.213</b>	<b>96,36 %</b>
		Jumlah balita di kabupaten/kota	<b>30.317</b>	
11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>74.902</b>	<b>85,08 %</b>
		Jumlah anak pendidikan dasar di kabupaten/kota	<b>73.268</b>	
12	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>232.442</b>	<b>80,74 %</b>
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota	<b>287.897</b>	

	13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	<b>39.814</b>	<b>98,70 %</b>
			Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di kabupaten/kota	<b>42.044</b>	
	14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>80.133</b>	<b>85,43 %</b>
			Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota	<b>93.802</b>	
	15	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>3.162</b>	<b>100 %</b>
			Jumlah penderita DM di kabupaten/kota	<b>3.162</b>	
	16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>625</b>	<b>77,16 %</b>
			Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota	<b>810</b>	
	17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	<b>6.669</b>	<b>100 %</b>
			Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota	<b>6.669</b>	
	18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	<b>9.150</b>	<b>96,11 %</b>
			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/ kota	<b>9.520</b>	

<b>PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	<b>16.852</b>	<b>53,07 %</b>
			Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	<b>31.754</b>	
	20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan permukiman rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha)	<b>18947</b>	<b>53,79 %</b>
			Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	<b>35.187</b>	
	21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan yang dibangun (ha) ditingkatkan (ha) dioperasikan dan pelihara (ha)	<b>1,085</b>	<b>7,36 %</b>
			luas daerah irigrasi kewenangan kabupaten kota	<b>14.741</b>	
	22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota	<b>110.310</b>	<b>81.97 %</b>

		Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut	<b>134.578</b>	
23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya di olah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	<b>114.064</b>	<b>98,15 %</b>
		Jumlah rumah di kabupaten/ kota	<b>116.213</b>	
24	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	<b>38</b>	<b>97,44 %</b>
		Jumlah IMB yang berlaku	<b>39</b>	
25	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap	<b>194,56</b>	<b>24,36 %</b>
		Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota	<b>798,58</b>	
26	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/ analis	<b>31</b>	<b>9,78 %</b>
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah kabupaten/kota	<b>317</b>	
27	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<b>66</b>	<b>100 %</b>
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<b>66</b>	

<b>PERUMAHAN</b>	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024	<b>277</b>	<b>100%</b>
			jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024	<b>277</b>	
	29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah tangga penerima fasilitas penggantian hak atas penguasaan tanah dan atau bangunan+rumah tangga penerima subsidi uang sewa+rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni	<b>0</b>	
			Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program pemerintah daerah yang memenuhi kriteria penerima layanan	<b>0</b>	
	30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)	<b>3,38</b>	<b>3,24 %</b>
			Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	<b>104,48</b>	
31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	<b>613</b>	<b>0,46 %</b>	
		Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	<b>134,578</b>		

	32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit perumahan yang sedang dibangun terfasilitasi PSU	<b>0</b>	
			Jumlah unit perumahan kabupaten/kota	<b>0</b>	
<b>TRANTIBUMLINMAS</b>	33	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	<b>154</b>	<b>100 %</b>
			Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	<b>154</b>	
	34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	<b>4</b>	<b>100 %</b>
			Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	<b>4</b>	
35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	<b>100.617</b>	<b>100 %</b>	
36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	<b>150</b>	<b>0,06 %</b>	
37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	<b>426</b>	<b>100 %</b>	

	38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat daerah + Jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	42	100 %
			Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota	42	
	39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	10,3 menit	
<b>SOSIAL</b>	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1.570	43,51 %
			Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis	3.608	
	41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	89	76,07 %

	bencana daerah kabupaten/kota	populasi korban bencana alam dan sosial yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota	117	
--	-------------------------------	--	-----	--

Sumber : LPPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2024.

### III. HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN DAERAH

Berikut adalah hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) serta Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

#### Hasil EPPD atas LPPD Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017-2019

No	Uraian	Tingkat Provinsi	
		Skor	Kategori
1	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2018	2.783	Tinggi
2	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2021	2.54	Rendah
3	Hasil EPPD atas LPPD Tahun 2022	2.90	Sedang

Sumber : Bagian Pemerintahan Setdakab. Tulang Bawang

#### Opini BPK atas LKPD Kabupaten Tulang Bawang

Uraian	Opini
Opini BPK atas LKPD Tulang Bawang	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) 10 Tahun berturut-turut

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

### IV. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

#### Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024

No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	PENDAPATAN	1.376.492.626.555,00	1.256.694.984.678,68	91,30
2	BELANJA	1.395.351.801.195,00	1,261.235.027.630,86	90,39
	TRANSFER	206.723.453.245,00	204.647.092.576,00	91,40

Sumber : BPKAD Kabupaten Tulang Bawang

### V. REALISASI PENERIMAAN, REALISASI PENGELUARAN, DAN REALISASI PEMBIAYAAN MENURUT JENIS

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, dan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2024 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

**Realisasi APBD Kabupaten Tulang Bawang Tahun Anggaran 2023**

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.376.492.626.555,00</b>	<b>1.256.694.894.678,68</b>	<b>91,30</b>
	a. Pendapatan Asli Daerah	186.919.467.430,00	139.363.382.132,68	74,56
	b. pendapatan Transfer	1.189.572.659.125,00	1.117.331.602546,00	93,93
	c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah	0	0	0
2	<b>BELANJA</b>	<b>1.395.351.801.195,00</b>	<b>1.261.235.027.630,86</b>	<b>90,34</b>
	a. Belanja Operasi	1.040.506.327.935,00	924.971.280.111,51	88,90
	b. Belanja Modal	144.002.058.615,00	130.854.869.743,35	90,87
	c. Belanja Tak Terduga	4.119.961.400,00	761.785.200,00	18,49
	<b>TRANSFER</b>	<b>206.723.453.245,00</b>	<b>204.647.092.576,00</b>	<b>99,00</b>
	d. Transfer Bagi Hasil Pendapatan	197.997.752.277,00	202.045.319.158,00	102,04
	e. Transfer Bantuan Keuangan	8.725.700.968,00	2.601.773.418,00	30,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.395.351.801.195,00</b>	<b>1.261.235.027.630,86</b>	<b>90,34</b>
	<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>(18.859.174.640,00)</b>	<b>(4.540.042.952,81)</b>	<b>24,07</b>
3	<b>PEMBIAYAAN</b>			
	a. Penerimaan Pembiayaan	20.359.174.640,00	20.359.174.640,00	100,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	1.500.000.000,00	-	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>18.859.174.640,00</b>	<b>20.359.174.640,00</b>	<b>107,95</b>
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)</b>	<b>-</b>	<b>15.819.131.688,01</b>	<b>0,00</b>

**VI. INOVASI DAERAH**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Kabupaten Tulang Bawang pada Tahun 2024 telah melakukan berbagai inovasi dalam meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Inovasi tersebut diantaranya sebagai berikut :

